

## WAWANCARA DENGAN JENDERAL POL. SUROJO BIMANTORO: "SAYA HANYA INGIN INSTITUSI YANG SAYA PIMPIN INI DIHARGAI"

Diolah kembali dari: "Saya Akan Menyerahkan Tongkat Komando ke DPR", TEMPO Edisi 21 (23-29 Juli 2001), hlm. 42-43, dan sumber-sumber lain, serta wawancara tertulis

Jenderal Polisi Surojo Bimantoro adalah sosok yang "tenang tapi bandel" yang secara tak langsung dan pasif, merupakan kartu truf yang mempercepat lengsernya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden akibat konflik elite politik Presiden versus DPR. Padahal September tahun lalu, ia diangkat oleh Presiden menjadi Kapolri di bawah hujan kritik DPR. Itu tak lain karena Bimantoro diangkat menggantikan pendahulunya, Jenderal Rusdihardjo, yang diberhentikan dengan hormat tanpa persetujuan Parlemen.

Presiden dan para pendukungnya memang sukses membujuk Parlemen agar menerima pengangkatan Bimantoro, meski dengan syarat, "jangan diulagi lagi". Tapi ternyata, Presiden yang juga "bandel" mengulangi kekeliruannya

dengan "memecat" Bimantoro dan mengangkat Jenderal Chae-rudin Ismail tanpa persetujuan Parlemen. Hanya dampaknya saja yang lain, tidak seperti Rusdihardjo, Bimantoro justru menjadi salah satu kartu DPR dalam perang politik mereka melawan Presiden.

Bimantoro meskipun diangkat tidak lewat prosedur baku, bukan berarti ia sosok yang mudah disetir presiden sebagai alat kekuasaan. Sebab masa keserasian Bimantoro dan Presiden hanya sebentar. Baru satu bulan menjadi Kapolri, Bimantoro sudah berseberangan pikiran dengan Presiden, dalam penanganan Gerakan Papua Merdeka. Presiden Abdurrahman memperbolehkan pengibaran Bintang Kejora, simbol Organisasi Papua Merdeka, sedangkan Bimantoro tegas tidak mentoleransinya.

Perbedaan pendapat itulah yang menurut Kepala Badan Hubungan Masyarakat Mabes Polri menjadi awal mula kerenggangan hubungan Polri dan Istana. Hubungan baik tidak kunjung pulih, keretakan malah makin tambah, dan Bimantoro semakin tidak disukai Presiden.

Kasus penangkapan dua eksekutif perusahaan asuransi berkebangsaan Kanada yang diduga terlibat dalam pembelian saham ganda menjalar menjadi persoalan diplomatik Indonesia-Kanada. Lewat Menlu Alwi Shihab, Presiden gagal menghentikan persoalan ini di polisi. Penuntutan kasus itu baru bisa dihentikan setelah Jaksa Agung Marzuki Darusman ikut turun tangan.

Akibat memanasnya suhu politik nasional, ketika DPR menelorkan Memorandum II Mei 2001, polisi dituding tidak adil oleh Presiden; dianggap terlalu ketat melakukan razia terhadap para pendukung Presiden yang mau ke Jakarta untuk mengikuti "doa politik" mempertahankan Abdurrahman Wahid, sementara polisi membiarkan demonstran yang membawa pedang masuk sampai ke pelataran Istana.

Puncak ketegangan hubungan Presiden dengan Kapolri terjadi menyusul penangan demonstrasi para pendukung Abdurrahman Wahid di Pasuruan, Jawa Timur, Juni

2001. Dalam insiden itu, jatuh satu pendukung Presiden, tewas diterjang peluru aparat. Presiden marah besar. Ia menuduh polisi tidak proporsional menembak orang yang, kata presiden, sedang berada di warung makan.

Pada awal Juni 2001, hampir bersamaan waktu dengan pergantian lima menteri dan Jaksa Agung, Presiden minta Bimantoro mengundurkan diri. Namun, Bimantoro menolak. Esok harinya, Presiden melantik Inspektur Jenderal Chaerudin Ismail sebagai Wakil Kapolri, dan menonaktifkan Bimantoro. Yang menarik, jabatan Wakil Kapolri sebenarnya telah dihapus oleh Presiden sendiri melalui Keppres No. 54/2001 tertanggal 1 April 2001. Pengangkatan Chaerudin sekaligus merevisi keppres tersebut dengan keluarnya Keppres No. 77 tertanggal 21 Juni, yang berlaku surut 1 Juni 2001.

Kasus ini tambah memperuncing dualisme dalam tubuh kepolisian dan persekutuan Presiden dengan Parlemen. Pengangkatan Chaerudin memunculkan "petisi 102 perwira tinggi polisi" yang tidak menghendaki adanya politisasi di tubuh Polri.

Masalah Polri ini makin berlarut-larut. Bertepatan dengan peringatan Hari Bha-yangkara tanggal 1 Juli, Presiden mendadak secara lisan di podium mengumumkan pem-

berhentian Kapolri nonaktif Bimantoro dan—dengan gaya Orde Baru — mau “membuangnya” sebagai Dubes RI di Malaysia. Beberapa jam kemudian, lagi-lagi Bimantoro dengan sopan menolak. Situasi Mabes Polri makin panas, apalagi muncul pernyataan sikap para perwira menengah (pamen) Polri, meminta Bimantoro untuk ikhlas mundur, ditambah lagi berita tentang perintah Presiden kepada Menkopolkam Agum Gumelar untuk menangkap Bimantoro karena dianggap telah membangkang (melakukan insubordinasi) terhadap perintah Presiden. Agum pun ikut dibuat bingung, karena seperti pengakuannya sendiri, sebagai Menkopolkam, dia tidak dalam posisi melakukan tindakan operasional penangkapan, disamping tentu akan muncul “protes” dari perwira-perwira petinggi AD, AL, dan AU.

Bimantoro tetap ‘cool’ dan tidak goyah, dan sikap polisi untuk mengamankan proses Sidang Istimewa memaksa Presiden melakukan langkah lebih dramatis: melantik Chaerudin Ismail resmi sebagai Pejabat Sementara Kapolri. Pelantikan itu memicu krisis politik baru: DPR minta MPR segera menyelenggarakan Sidang Istimewa yang dipercepat, meski Presiden mengangkat Chaerudin “hanya” sebagai Pejabat Sementara

Kapolri namun dengan pangkat jenderal penuh bintang empat.

Enam jam sebelum pelantikan yang kontroversial itu, Bimantoro dan Chaerudin Ismail bertemu di lantai dua Gedung Utama Mabes Polri. Tidak jelas apa isi pertemuan tersebut. Tapi wajah Bimantoro sangat kusam. Ia beberapa kali mengusap wajahnya yang gelisah.

Akhirnya, sempat sebuah truk berhenti di halaman rumah Bimantoro, rumah dinas Kapolri dan mengangkut perabotan miliknya. Apakah Bimantoro sudah menyerah? Kepada siapa dia akan menyerahkan tongkat komando Kapolri yang masih dipegangnya?

Di saat-saat gonjangan institusional itu, Jenderal kelahiran Gombang, Jawa Tengah menerima Bambang Harymurti dan Edy Budiwarso dari TEMPO untuk sebuah wawancara. Berikut ringkasannya dan tambahan dari sumber-sumber lain, termasuk wawancara tertulis dengan Beliau.

**Apakah benar Anda pernah mengatakan tidak cocok dengan kebijakan Presiden Wahid setelah meletus insiden di Pasuruan, Jawa Timur?**

Saya memang dipanggil beliau (Presiden) dan saya mengatakan siap diganti asalkan

melalui prosedur yang benar. Prosedur yang benar, menurut saya, sesuai dengan Ketetapan MPR No. VII, harus ada persetujuan DPR. Jadi, masalahnya bukan saya tidak mau diganti dan berusaha sekuat tenaga mempertahankan jabatan itu. Tetapi masalahnya adalah bagaimana institusi yang saya pimpin ini dihargai, karena sudah ada ketentuan yang mengatur pergantian Kapolri.

**Sikap Anda kemudian ditiru oleh Panglima TNI, yang tidak akan diganti tanpa persetujuan DPR?**

Ya. Panglima TNI menyampaikan hal serupa ini di DPR. Tidak masalah diganti, asal sesuai dengan prosedur. Saya kira tidak ada perbedaan sikap antara TNI dan Polri.

**Syarat yang Anda minta dari Presiden kan kemudian sudah dipenuhi, termasuk meminta persetujuan DPR...**

Ya, kita tunggu saja persetujuan DPR. Kalau DPR-nya menyetujui, saya anggap masalah di tubuh Polri ini selesai. Yang menjadi masalah buat saya adalah bagaimana kita polisi ini harus menghormati lembaga kepresidenan yang sudah mengeluarkan keppres. Kita juga harus menghormati institusi

kepolisian, dimana Polri sudah meniadakan lembaga Wa-Kapolri dan walaupun ada, jabatan Wa-Kapolri itu diangkat oleh Kapolri, karena merupakan urusan internal polisi bukan oleh Presiden. Tolong, hal ini dikembalikan prosedurnya. Selain itu, bagaimana penghormatan kepada pribadi saya, yang telah dinonaktifkan, dan juga kehormatan Chaerudin Ismail, yang kemudian dijadikan Wa-Kapolri.

**Bagaimana pula soal tongkat komando Anda yang ditagih presiden? Bukankah setelah menonaktifkan Anda, Presiden sudah minta Anda menyerahkan tongkat itu?**

Tongkat komando melekat pada jabatan, fungsi, dan tugas sebagai Kapolri. Karena itu, ketika Presiden meminta saya menyerahkan tongkat komando itu, saya menyurati beliau. Kami katakan, tongkat melekat pada jabatan Kapolri. Karena itu, saya akan menyerahkan tongkat komando itu kepada Kapolri berikutnya jika sudah dinyatakan sah pemberhentian saya. Karena saya melihat DPR belum memberikan persetujuan, masalah tongkat-menongkat serta panji-panji dan pataka belum saya serahkan.

**Anda pernah mengusulkan delapan nama calon pengganti Anda kepada Presiden Wahid. Apakah nama Chaerudin ikut termasuk?**

Begitu ceritanya. Saya membuat surat satu minggu setelah saya dipanggil Presiden dalam kasus Papua itu. Saya sampaikan kepada beliau, karena sudah tidak ada lagi kesempatan di dalam penanganan keamanan, Presiden sebaiknya mengganti Kapolri, dalam hal ini saya. Agar Presiden lebih mudah menunjuk pengganti, saya sampaikan delapan orang calon termasuk Chaerudin Ismail.

**Tetapi Anda sepertinya tidak setuju Chaerudin menggantikan Anda. Bukankah Anda mengusulkan agar dicari pengganti figur selain Anda dan Chaerudin?**

Iya, itu hanya usulan untuk penyelesaian sementara masalah di tubuh Polri, sampai terpilihnya Kapolri definitif yang sesuai dengan prosedur. Jadi, saya usulkan ditunjuk Pejabat Sementara (Pj.S) Kapolri yang bukan saya dan juga bukan Chaerudin. Jika kemudian Kapolri definitif sudah ditunjuk, Pj.S tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi.

**Bagaimana Anda melihat rencana Presiden Wahid melantik Chaerudin Ismail. Adakah skenario di belakangnya, misalnya menggagalkan Sidang Istimewa?**

Saya tidak tahu.

**Anda akan tetap menunggu persetujuan DPR, sementara Presiden tetap melantik Chaerudin Ismail? Apakah ini tidak menimbulkan adanya dualisme kepemimpinan Polri?**

Saya akan mencari solusi terbaik dengan Chaerudin. Saya kembalikan masalah ini kepada DPR.

**MPR mengancam akan menggelar sidang istimewa (SI). Bagaimana jika keputusan SI memerintahkan kepada Kapolri supaya mengamankan hasil SI MPR?**

Soal pengamanan itu, sudah kami persiapkan pasukan yang akan kami gelar. Saya kira polisi selalu siap mengamankan agenda nasional, agenda kemasayarakatan. Orang sunatan saja akan kami amankan jika meminta bantuan polisi, apalagi MPR.

**Apakah tidak menjadi mimpi buruk di tubuh Kepolisian jika sampai ada perintah Chaerudin untuk Anda?**

Saya baru saja bicara dengan Dik Chaerudin. Secara pribadi, saya tidak ada masalah dengannya. Dengan Presiden, secara personal pun saya tidak masalah.

**Mengapa Anda tidak langsung mengajukan *judicial review* untuk menggagalkan keputusan Presiden, tetapi meminta purnawirawan dan praktisi hukum mengajukannya ke MA?**

Saya perlu meluruskan bahwa saya tidak pernah meminta mereka mengajukan *judicial review* ke MA. Saya tidak pernah meminta siapa pun untuk mengajukan *judicial review*. Kalau saya melakukan itu, seolah-olah saya ini tidak ikhlas diganti. Padahal sedari awal saya sudah mengatakan kepada Presiden, saya ikhlas diganti.

Kedua, saya memandang tidak etis jika seorang bawahan seperti saya mempersoalkan surat keputusan yang menyangkut diri saya sendiri. Karenanya, saya tidak melakukan *judicial review* ataupun mengajukan ke PTUN.

Jadi, seperti sudah saya ungkapkan, saya menerima pemberhentian dengan

hormat, saya ucapkan terima kasih kepada Presiden, tetapi silakan menempuh prosedur yang benar.

**Bagaimana ceritanya, kok sampai muncul tuduhan bahwa Anda melakukan rapat gelap dengan para Jenderal dan purnawirawan di rumah dinas Kapolri, sehingga sempat ada perintah Presiden untuk menangkap Anda?**

Para purnawirawan itu malah sudah mengadakan rapat sendiri bersama Adnan Buyung Nasution. Pada waktu itu, mereka meminta waktu bertemu untuk menerima masukan dari saya. Kebetulan minta waktunya malam. Maka, saya minta pertemuannya di rumah dinas saya. Karena merasa ini bukan masalah pribadi, saya undang juga Sekjen Mabes Polri, Kepala Badan Pembinaan Hukum, dan beberapa perwira tinggi lain, termasuk ada anggota DPR RI yang mantan anggota Polri.

**Apa yang mereka—Adnan Buyung dan para purnawirawan—inginkan dari pertemuan itu?**

Mereka ingin minta pendapat saya. Saya sampaikan bahwa saya tidak bisa menghalang-halangi mereka melakukan *judicial review*, tetapi secara

pribadi saya tidak akan melakukannya. Lantas, mereka meminta saya menjelaskan masalah yang sebenarnya.

**Walaupun kemudian dibantah sendiri oleh Presiden, berita seputar rencana penangkapan Anda sudah santer sekali.**

Ya, sudahlah. Waktu itu, saya sendiri sudah mengambil cuti.

**Bisakah diceritakan sedikit isi pembicaraan Anda dengan Pak Chaerudin enam jam sebelum ia dilantik sebagai Pejabat Sementara Kapolri?**

Saya katakan dan sarankan untuk menolak, "Anda masih bisa jadi pahlawan Polri dengan menolak jabatan Kapolri". Tetapi jawabannya sama dengan pertemuan pertama setelah dilantik menjadi Wakapolri, yaitu: "Siapa yang tidak mau naik pangkat".

**Apa, sih, perbedaan pemberhentian Rusdihardjo dengan pemberhentian Anda? Bukankah pada awalnya naiknya Anda jadi Kapolri juga diprotes DPR?**

Pak Rusdihardjo langsung diberhentikan, tidak dinonaktifkan. Sedangkan saya dinonaktifkan. Istilah non-aktif tidak

dikenal dalam sistem administrasi polisi. Pada akhirnya DPR menerima saya, dengan catatan untuk Presiden agar tidak mengulangi lagi cara-cara demikian di kemudian hari.

**Bagaimana kabarnya para Pamen yang membangkang sekarang?**

Mereka ditugaskan/diperbantukan di beberapa staf di lingkungan Mabes Polri dengan status Pamen Mabes Polri

**Apa harapan terhadap institusi Polri di masa mendatang dalam hubungan dengan Presiden?**

Sesuai ketentuan dan aturan yang ada

**Di masa mendatang, bagaimana andaikan Presiden melakukan tindak pidana, Kapolri harus memeriksa Presiden, padahal Presiden atasan langsung Kapolri?**

Harus dilaksanakan

**Apa rencana hidup Jenderal setelah pensiun dari Polri?**

Menjalani hidup dan menikmati hidup bersama anak-anak dan istri.

\*\*\*